



## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO (JKSS) DI KOTA PADANG

### *EVALUATION PROGRAM FOR THE IMPLEMENTATION OF SUMATERA BARAT SAKATO HEALTH GUARANTEE (JKSS) IN PADANG CITY*

Nurul Abdillah<sup>1</sup>, Anggun Novikha Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Stikes Syedza Sainatika

Email : [Abdillahadik15@gmail.com](mailto:Abdillahadik15@gmail.com) , 082268120465

#### ABSTRAK

Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) masih terdapat permasalahan terkait pengelola Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) di Kota Padang tahun 2017. Desain penelitian ini adalah kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*Indept Interview*) dengan salah satu pemegang JKSS di Dinas Kesehatan Kota Padang, telaah dokumen, dan tabel *Checklist Observasi*, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian dari komponen *input*, didapatkan untuk tenaga, dana, sarana dan kebijakan sudah cukup baik atau memadai, namun pada metode terdapat permasalahan yaitu untuk alur tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada komponen proses, untuk perencanaan dan pengorganisasian sudah baik, namun pada pelaksanaan dan pengawasan terdapat permasalahan yaitu pada pelaksanaan kelurahan tidak sesuai dengan aturan dan pada pengawasan sudah baik, namun pada hasil monev terdapat masalah pada pengelola JKSS. Komponen *output*, Pelaksanaan JKSS saat ini sudah berjalan dengan baik, namun dari segi data masih ditemukannya masalah. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) di Kota Padang tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Disarankan kepada petugas pelaksanaan JKSS untuk mengikuti alur yang telah ditetapkan agar data menjadi valid dan akurat.

**Kata Kunci** : Evaluasi; Pelaksanaan; Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato

#### ABSTRACT

*In the implementation of the West Sumatra Sakato Health Insurance program (JKSS) there are still problems regarding the management of the West Sumatra Sakato Health Insurance (JKSS). Therefore the purpose of this study is to evaluate the implementation of the Sakato West Sumatra Health Insurance program (JKSS) in Padang City in 2017. The design of this study was qualitative, the determination of the informants was carried out by in-depth interviews (Indept Interview) with one of the JKSS holders in the Padang City Health Office, document review, and Observation Checklist tables, data analysis was carried out using a content analysis approach. To test the validity of the data used is triangulation. The results of the research from the input components, obtained for energy, funds, facilities and policies are quite good or adequate, but the method has a problem that is to not flow in accordance with the established rules. In the process component, for planning and organizing it is good, but in the implementation and supervision there are problems, namely in the implementation of kelurahan not in accordance with the rules and the supervision is good, but in the monev results there are problems in the JKSS manager. The output component, the implementation of JKSS is currently running well, but in terms of data, problems are still being found. The implementation of the Sakato West Sumatra Health Insurance program (JKSS) in Padang City in*



*2017 has not been going well. It is recommended that JKSS implementation officers follow the established path so that the data becomes valid and accurate.*

**Keywords:** *Evaluation; Implementation; Health Insurance; West Sumatra Sakato*

## PENDAHULUAN

Kota Padang adalah sebagai salah satu dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun sejalan dengan penyelenggaraan JKN, Pemerintah Kota Padang tetap melanjutkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Padang. Sasaran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) adalah seluruh warga Kota Padang yang tidak mampu dan miskin. Untuk Sistem Pelayanan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.90 Tahun 2012. Untuk tata cara pembayaran jaminan kesehatan sumatera barat sakato (JKSS) diatur dalam peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.91 tahun 2012 dan pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan Peraturan Gubernur No.29 tahun 2014. Peraturan Gubernur No.50 Tahun 2014 tentang integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2015).

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang jumlah seluruh penduduk Kota Padang di tahun 2016 sebanyak 914.968 jiwa, terdiri dari 457.090 jiwa laki-laki dan 457.878 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Kota Padang yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebanyak 668.535 jiwa, dengan peserta PBI APBN sebanyak 197.801 jiwa dan PBI APBD/JKSS sebanyak 73.697 jiwa dan PBI APBD Provinsi sebanyak 150 jiwa dan non PBI sebanyak 396.887. Jumlah penduduk Kota Padang yang terdaftar di BPJS Kesehatan diperkirakan 71,07% (Dinas Kesehatan Kota, 2016).

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu pemegang JKSS di Dinas Kesehatan Kota Padang dan data awal diketahui terdapat permasalahan pada kepesertaan yaitu pada bulan januari sampai desember data yang diusulkan dari seluruh kelurahan sebanyak 77.089 orang yang ada di Kota Padang ditemukan data ganda pada peserta JKSS sebanyak 40 orang. Data tidak bisa dimigrasi atau tidak memenuhi syarat, dalam pengusulan data 77.089 jiwa ada yang tidak bisa dimigrasi oleh BPJS ke PBI APBD (JKSS) disebabkan karena peserta yang diusulkan sudah terdaftar di BPJS dengan status mandiri menunggak, PBI APBD aktif dan PBI APBN aktif, Jumlah peserta yang tidak bisa dimigrasi dan ganda sebanyak 3.392 orang. Adanya keluhan dari Peserta bahwa kartu tidak aktif, penyebab kartu peserta tidak aktif pada tahun 2016 disebabkan peserta tersebut termasuk dalam data yang dihapus karena terindikasi ganda dengan APBN, dimana peserta tersebut terdaftar juga sebagai PBI APBN/Jamkesmas, dan penyebab lain kartu tidak aktif karena data tidak bisa dimigrasi oleh BPJS. Jumlah peserta JKSS sampai bulan desember sebanyak 73.697 orang (Kementrian Kesehatan, n.d.).

Berdasarkan hasil penelitian di Pariaman didapatkan bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sabiduk Sadayuang (JKSS) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan teori asuransi. Ditemukan kendala seperti kepesertaan JKSS yang tidak bersifat tetap, tim penyelenggara yang belum memenuhi dari segi sarana prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola JKSS serta belum adanya SDM yang berkompeten dalam bidang asuransi kesehatan. Disisi lain Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) juga terbatas dan masih terdapatnya peserta yang kurang memahami alur dan prosedur di Pemberi Pelayanan Kesehatan (Dewi, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian di Gorontalo kepesertaan BPJS belum efektif karena masih ada masyarakat yang tidak termasuk dalam data base kepesertaan,



pengorganisasian belum efektif karena kurang koordinasi, penganggaran belum efektif karena pembayaran berdasarkan klaim sehingga susah dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program juga belum efektif karena masih ada keluhan pasien terutama dalam administrasi pelayanan yang sangat panjang dan rumit (Tarigan, 2011).

Berdasarkan penelitian di RSUD DR. Moewardi Surakarta menunjukkan aspek kepesertaan meliputi bangsal perawatan kelas III sering penuh, sehingga terpaksa pasien JKN kelompok PBI sering antri perawatan rawat inap di IGD atau terpaksa pindah rumah sakit. Dari aspek pelayanan kesehatan, adanya batasan-batasan jenis pelayanan untuk tiap jenis jaminan kesehatan. Dari aspek tarif pelayanan, adanya obat yang tidak termasuk ke dalam Fornas (Tarigan, 2011).

Hasil penelitian di Samarinda Ilir menunjukkan pelaksanaan program Jamkesda di Puskesmas Sidomulyo sudah sangat baik ini dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan social, ekonomi dan budaya yang baik di Puskesmas Sidomulyo. Akan tetapi masih ada kekurangan yaitu bahan di laboratorium yang kurang dan pembatasan pengobatan pada penyakit tertentu yang ditanggung oleh program Jamkesda (Irawan, 2017).

Berdasarkan Permasalahan tersebut, maka perlu dipertanyakan apakah program JKSS yang diselenggarakan di Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian "Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) di Kota Padang Tahun 2017" (Muninjaya, 2016).

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan tujuan untuk mengkaji Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) di Kota Padang tahun 2017. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti (Hamdani, 2011).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

Pada penelitian ini yang sebagai informan kunci yang melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan selanjutnya disebut dengan informan peneliti. Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus dan yang bersedia untuk berbagi pengetahuan dengan peneliti (Martha, Evi dan Kresno, 2016). Teknik penentuan informan yang diwawancari dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih dengan tujuan tertentu.

Teknik penentuan informan secara purposive sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan :

1. Informan mengetahui masalah lebih luas sehubungan dengan obyek penelitian.
2. Informan dapat dipercaya sebagai sumber data sehubungan dengan obyek penelitian.

Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan Observasi, Indepth interview, dan telaah dokumen. data yang dikumpulkan dari data primer dan sekunder dilakukan dengan cara :

1. Pengamatan (Observasi)
2. Indepth Interview (Wawancara Mendalam)
3. Telaah Dokumen

Alat Pengumpulan data atau instrumen penelitian ini diperlukan atau yang digunakan adalah :

1. Pedoman wawancara yaitu sederetan pertanyaan sehubungan dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Check list yaitu alat untuk memperjelaskan hal-hal yang meragukan dan tidak terungkap dalam wawancara mendalam.
3. Buku catatan yaitu berfungsi untuk mencatat setiap hasil wawancara dengan sumber data (informan) sehubungan dengan obyek penelitian.



4. Tape Recorder yaitu berfungsi untuk merekam wawancara yang dilakukan sumber data (informan) sehubungan dengan obyek penelitian.

5. Handphone yaitu berfungsi untuk mendokumentasikan informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan :

1. Data Reduction (Reduksi Data)
2. Data Display (Penyajian Data)
3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan).
4. Triangulasi

Analisis data yang akan dipakai pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), sesuai dengan masalah peneliti dapat diperoleh Evaluasi Pelaksanaan Program JKSS di Kota Padang tahun 2017. Informasi yang telah didapat segera dievaluasi satu persatu. Informasi yang didapatkan langsung disatukan dengan rekaman dan catatan tambahan yang dibuat oleh peneliti. Setelah itu dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan membuat matriks atau tabel untuk mengelompokkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan informan.

Teknik yang digunakan adalah triangulasi, Pada metode triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu membandingkan data hasil wawancara keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Pembahasan dilakukan secara deskriptif terhadap unsur-unsur input, proses dan output. Peneliti juga menggunakan pengujian keabsahan terhadap data yang telah didapatkan dengan menggunakan triangulasi :

- a. Triangulasi Sumber
- b. Triangulasi Metode

## PEMBAHASAN

### 1. Komponen Input

- a. Ketersediaan Jumlah Tenaga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai ketersediaan tenaga dalam pengelola JKSS diketahui

bahwa informan mengatakan tenaga pengelola JKSS yang ada di Dinas Kesehatan ataupun di Kelurahan sudah cukup, walaupun terdapat di kelurahan pengelola JKSS terdiri dari 1 orang.

Menurut asumsi peneliti bahwa jumlah tenaga pelaksanaan JKSS, untuk mengelola JKSS di Kelurahan dapat menambahkan tenaga pengelola JKSS agar tidak membebankan tugas hanya 1 orang saja.

- b. Ketersediaan Jumlah Dana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa ketersediaan dana untuk pelaksanaan JKSS di Kota Padang berasal dari sharing (gabungan) antara Provinsi dan Kota yaitu 20% Provinsi dan 80% dari Kota. Dan untuk pendanaan JKSS sudah cukup dan efektif sesuai dengan jumlah peserta JKSS yang terdaftar.

Menurut asumsi peneliti bahwa untuk anggaran Peserta JKSS di Kota Padang sudah cukup dan efektif, karena adanya dana sharing antara Provinsi dan Kota Padang.

- c. Jumlah ketersediaan Sarana

Berdasarkan hasil penelitian untuk sarana yang mendukung pelaksanaan JKSS di Kota Padang sudah cukup memadai baik di Kelurahan maupun di Dinas Kesehatan Kota Padang. Sarana sudah seperti laptop, komputer, printer, dan mesin tik.

Menurut asumsi peneliti bahwa sarana yang tersedia di Dinas Kesehatan maupun di kelurahan sudah memadai karena dapat dilihat dari hasil wawancara di Dinas Kesehatan Kota dan Kelurahan.

- d. Metode

Berdasarkan hasil penelitian untuk metode yang digunakan dalam pelaksanaan JKSS belum sesuai dengan kerangka acuan rencana kerja. Masih terdapat pihak kelurahan yang tidak mengirimkan data sesuai KARK.

Menurut asumsi peneliti bahwa langkah-langkah yang



digunakan dalam pelaksanaan JKSS belum sesuai dengan kerangka acuan rencana kerja. Solusi untuk metode pelaksanaan JKSS ini diharapkan adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Kelurahan dan memberikan informasi mengenai metode dalam pelaksanaan JKSS.

e. Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap informan kebijakan sudah dibuat berdasarkan Permensos no 5 tahun 2016 dan untuk kepesertaannya dibuat dan di tanda tangani oleh wali kota. Berdasarkan asumsi peneliti bahwa kebijakan yang ada dalam pelaksanaan JKSS sudah ada berdasarkan Permensos no 5 tahun 2016.

2. Komponen Proses

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kelurahan dalam pelaksanaan JKSS untuk POA yang dibuat kemudian diadakan pertemuan, sebelum dilaksanakannya pelaksanaan JKSS.

Berdasarkan telaah dokumen chek list observasi yang terlihat oleh peneliti di Dinas Kesehatan yang dilakukan penelitian, Perencanaan dibuat dan dilakukan pertemuan antara instansi yang terkait pengelola JKSS di Dinas Kesehatan Kota Padang.

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa setelah dibuatnya POA maka dilakukan pertemuan antara pihak yang mengelola atau masyarakat yang belum tau tentang JKSS.

b. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan di Dinas Kesehatan Kota Padang diketahui bahwa pelaksanaan Program JKSS struktur organisasi untuk pelaksanaan JKSS sudah ada yang dikoordinasikan oleh Kasie Jaminan kesehatan.

Menurut asumsi peneliti bahwa dalam proses pelaksanaan

JKSS struktur pengorganisasian sudah ada, maka diperlukan hubungan yang baik sesama petugas dan lingkungan kerja yang baik dan kondusif.

c. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan di Dinas Kesehatan Kota Padang untuk pelaksanaan JKSS dimulai dari pendataan dari kelurahan kemudian dikirim ke Dinas Sosial, kemudian Dinas sosial mengirimkan ke Dinas Kesehatan, dan Dinas kesehatan mengirim ke BPJS kesehatan. Data yang diusulkan kelurahan maupun wargayang ingin menjadi peserta JKSS harus memperjelas no NIK.

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang dan kelurahan pendataannya harus sesuai dengan syarat dan alur yang telah ditentukan oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelola JKSS agar berjalan dengan baik.

d. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada informan, untuk pelaksanaan JKSS di Kota Padang melakukan monev dari pihak Dinas Kesehatan ke kelurahan. Untuk monev dilaksanakan 1 tahun 1 kali, apabila suatu kelurahan terdapat permasalahan maka monev boleh dilakukan lebih dari 1 kali.

Menurut asumsi peneliti bahwa jika terdapat masalah di suatu kelurahan maka pihak kelurahan melaporkan ke Dinas Kesehatan agar pihak Dinas kesehatan melakukan monev dan dapat dilihat penyebab masalah tersebut.

3. Komponen Output

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan, untuk pelaksanaan JKSS saat ini sudah berjalan dengan baik, namun kendala nya dari segi data yang masih terdapat masalah seperti data yang



ganda, data yang tidak bisa dimigrasikan, dan kartu peserta yang tidak aktif lagi.

Berdasarkan hasil telaah dokumen masih ada ditemukannya kendala dalam pelaksanaan JKSS di Kota Padang, temuan tersebut berupa data yang ganda, data tidak bisa dimigrasikan, dan kartu peserta tidak aktif.

Jadi dapat diasumsikan bahwa untuk pelaksanaan JKSS sudah berjalan dengan baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pihak kelurahan mampu mendata masyarakat dari nol atau diputihkan lagi pengusulan data untuk penerima JKSS. Dan diharapkan setiap pengelola Program JKSS mengikuti prosedur sesuai dengan yang telah ditetapkan agar dapat terwujud pelaksanaan JKSS yang lebih baik. Demikian dengan data agar data bisa lebih akurat dan tepat sasaran. Dan untuk menambahkan tenaga pengelola JKSS di Kelurahan dan kerjasama lintas sektor seperti rt/rw, tokoh agama atau tokoh masyarakat. Dan bagi masyarakat yang mampu diharapkan tidak mendaftarkan sebagai penerima JKSS. Walaupun sudah terdaftar untuk dapat mengundurkan diri agar masyarakat yang membutuhkan dapat kita bantu.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Program JKSS di Kota Padang belum secara utuh mendapatkan informasi mendalam, maka dapat disimpulkan :

### a. Komponen Input

Tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan program JKSS tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kota Padang sudah cukup, namun pada Kelurahan masih kurang, yaitu hanya 1 orang pengelola JKSS dan dibantu oleh Pembantu Suka Rela. Untuk ketersediaan dana Pelaksanaan JKSS tahun 2017 sudah cukup dan efektif sesuai dengan peserta JKSS yang terdaftar. Sarana yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Padang dan Kelurahan sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan Program JKSS 2017. Metode yang

digunakan dalam pelaksanaan Program JKSS tahun 2017 belum sesuai dengan Kerangka Acuan Rencana Kerja dan ditemukan nya masalah. Dan untuk kebijakannya pelaksanaan JKSS tahun 2017 sendiri sudah ada dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

### b. Komponen Proses

Proses perencanaan dilakukan setelah dibuatnya POA maka dilaksanakannya pertemuan setiap tahunnya dalam Pelaksanaan Program JKSS tahun 2017. Untuk pengorganisasian pelaksanaan program JKSS tahun 2017 sudah sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pengelola JKSS. Pelaksanaan Program JKSS tahun 2017 belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, karena masih ditemukan data yang ganda atau tidak valid. Pengawasan dalam pelaksanaan program JKSS tahun 2017 dilakukan monev tiap tahun kecuali kelurahan yang mempunyai masalah dilakukan monev lebih dari 1 kali.

### c. Komponen Output

Untuk pelaksanaan Program JKSS tahun 2017 belum terlaksana dengan baik, karena masih ditemukannya kendala seperti data yang ganda, data yang tidak bisa dimigrasikan dan kartu peserta yang tidak aktif lagi, karena alur atau metode tidak sesuai dengan yang telah dibuat.

## SARAN

Bagi instansi agar dapat Menambahkan tenaga pelaksanaan Program JKSS di Kelurahan. untuk metode atau alur pengusulan data Program JKSS harus sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dan perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor seperti rt/rw, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Agar dalam mendata ulang status penerima bantuan asuransi masyarakat lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. A. R. (2014). Analisis Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



- di Puskesmas Belawan Tahun 2014. *USU Institutional Repository*.
- Dinas Kesehatan Kota. (2016). *Profil Kesehatan di Kota Padang*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. (2015). *Profil Kesehatan 2015*.
- Hamdani. (2011). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan masyarakat berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 903/Menkes/Per/v/2011.di Puskesmas Sawahan. *Jurnal Public Health*.
- Irawan, E. F. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) Kota Pariaman Tahun 2017. *eSkripsi Universitas Andalas*.
- Kementrian Kesehatan. (n.d.). *Profil Kesehatan Indonesia tentang JKN*.
- Martha, Evi dan Kresno, S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kesehatan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muninjaya, G. (2016). *Manajemen Kesehatan, Edisi Ketiga*. EGC.
- Tarigan. (2011). Efektivitas Pengelolaan Program Jamkesda di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Health and Sport, Vol.3*.